

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan analisa diatas, bahwa penulisan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerangka pemikiran kerja sama bilateral, foreign direct investment dan renewable new energy. Diketahui bahwa proyek PLTA Rajamandala merupakan salah satu terealisasi nya bagian dari Public Private Partnership (PPP) atau jika di Indonesia dapat dikenal dan diketahui dengan sebutan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang merupakan skema penyediaan infrastruktur publik dengan mengikutsertakan peran pihak swasta.

Kerja sama ini dilakukan oleh dua negara yakni Indonesia dan Jepang dengan menyepakati dalam membentuk Joint Venture dengan membangun suatu perusahaan patungan bernama PT Rajamandala Electric Power (REP). Kesepakatan tersebut disahkan dengan penandatanganan Shareholders Agreement IP No 94.Pj/0601/IP/2012 antara KPIC Netherlands B.V dan PT Indonesia Power yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2012. Adapun tujuan dalam mendirikan Perusahaan Proyek untuk penyediaan tenaga listrik, dan untuk tujuan tersebut Perusahaan Proyek dapat terlibat dalam pembangunan, kontruksi, kepemilikan, operasi dan pemeliharaan Proyek dan kegiatan terkait, termasuk pembiayaan kebutuhan fasilitas untuk pembangunan tujuan perusahaan.

Dengan terbentuknya Perusahaan Patungan PT Rajamandala Electric Power, maka setiap yang berhubungan dengan proyek PLTA Rajamandala akan dikelola dan ditangani oleh PT Rajamandala Electric Power yang merupakan hasil dari kegiatan Joint Venture antara Indonesia dan Jepang. Dalam membentuk Joint Venture merupakan bagian dari *Foreign Direct Investment*. Segala aktivitas atau kegiatan dalam

Pembangunan EBT Proyek PLTA Rajamandala maka akan dikendalikan atau perlu persetujuan PT Rajamandala Electric Power selaku Perusahaan Proyek hasil pembentukan Joint Venture. Adapun dalam proses pembangunan proyek PLTA Rajamandala terdapat Transfer Teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Teknologi Jepang telah dijadikan opsi yang sangat profitabel bagi investasi di Indonesia, dengan kelebihan yang didapatkan serta kualitas yang mempunyai keunggulan. Investasi Jepang diketahui selain mewujudkan lapangan kerja juga membentuk supply chain dan juga transfer teknologi. Keutamaan dari proyek PLTA Rajamandala yaitu pada sistem operasionalnya dengan menggunakan teknologi yang dirakit oleh Jepang. Peralatan teknologi yang berkualitas tinggi serta civil engineer Jepang yang dari awal disertakan dalam membangun PLTA dengan memanfaatkan aliran sungai Citarum yang air keluarannya berasal dari PLTA Saguling. Adapun perihal pekerjaan dan tenaga ahli asal Jepang dalam melatih para pekerja lokal agar menjadi pekerja yang profesional.

Dalam mengembangkan proyek PLTA Rajamandala telah mengikutsertakan cukup banyak teknisi dari Indonesia. Teknisi Lokal dari Indonesia diundang ke *Human Resource Development (HRD) Centre* di Kansai yang akan menampung daya muat dengan jumlah 700 orang yang akan memperoleh beragam pelatihan teknis kelistrikan dengan berbagai metode, *group training*, *On the job Training (OJT)*, serta *self-development assistance*.

Pembangunan EBT Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Rajamandala menggunakan pendanaan proyek yang diterapkan melalui skema *International Project Financing*, dengan *sindikasi Japanese Bank for International Cooperation (JBIC)* dan *Mizuho Bank* selaku lender. Bantuan pendanaan proyek PLTA Rajamandala ini dilakukan dengan tanpa adanya Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) dari Pemerintah Indonesia. Tanpa adanya JKU ini merupakan salah satu rintangan terbesar dalam upaya merealisasikan proyek PLTA Rajamandala sebab pada dasarnya dunia

perbankan itu memerlukan jaminan sebelum bersedia membiayai suatu pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Adapun untuk mengganti JKU dari Pemerintah, PT Rajamandala Electric Power memanfaatkan jaminan yang diluncurkan oleh *Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)*, yang merupakan salah satu dari badan milik *World Bank*, dengan mempersembahkan fasilitas asuransi investasi untuk pembiayaan proyek PLTA Rajamandala atas usul Mizuho Bank sebagai *Financial advisor*. Pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Rajamandala menyerap total pembiayaan hingga pada saat beroperasi pada bulan Mei 2019 dengan total US\$ 150 juta atau setara dengan Rp 2 triliun dan tidak memakai jaminan dari Pemerintah. Dari total pendanaan sebesar US\$ 150 juta tersebut, dua bank Jepang mendanai 75% dan sisanya yaitu 25% dituntaskan dari ekuitas hak pemiliki pemegang saham.

Sebenarnya, penerapan skema pendanaan yang tidak menggunakan JKU dari pemerintah Indonesia seperti ini dapat dikatakan sebagai kemajuan yang cukup signifikan untuk pembangunan pembangkit listrik yang terhambat masalah anggaran di Indonesia. PLTA Rajamandala dapat dijadikan sebagai percontohan untuk pembangunan pembangkit listrik di Indonesia. Dengan adanya skema bisnis seperti ini, diketahui merupakan sebagai wujud dari level kepercayaan yang cukup tinggi dari lembaga pendanaan internasional tentang bisnis ketenagalistrikan di Indonesia. Kesuksesan pembangunan PLTA Rajamandala jadi sebuah bukti kalau pihak asing telah memandang proyek infrastruktur di Indonesia masih dapat dikatakan *feasible* dari aspek bisnis walaupun tidak menggunakan JKU dari Pemerintah.

Pembangunan Proyek PLTA Rajamandala yang merupakan bagian dari proyek di sektor energi baru terbarukan mempunyai implikasi terhadap kondisi energi nasional dengan adanya penambahan pasokan energi nasional, khususnya proyek tersebut juga akan menguatkan sistem interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali, serta menjadi backup system kelistrikan terutama di kawasan Kabupaten Bandung.

PLTA Rajamandala tidak hanya mempunyai peran dan keterlibatan pada pasokan energi nasional, namun juga mempunyai fungsi penting untuk menangani perihal perubahan iklim. Pemerintah selalu berupaya meningkatkan pembangunan pembangkit listrik berbasis di sektor energi baru terbarukan dalam upaya meraih target 23% penggunaan EBT pada target energi yang tercantum dalam Kebijakan Energi Nasional, dan PLTA Rajamandala ini merupakan salah satu dari cara dalam menjangkau target 23% energi baru terbarukan pada tahun 2025.

Dengan adanya kerja sama ini membuat jalinan hubungan antara Indonesia dan Jepang semakin baik dan erat, meningkatkan terjalinnya hubungan persahabatan kedua negara. Diketahui kalau Jepang merupakan suatu negara yang sudah banyak terlibat dalam pembangunan Indonesia selama ini. Sehingga dengan kesuksesan terjalinnya kerja sama Indonesia dan Jepang dalam pembangunan energi baru terbarukan proyek PLTA Rajamandala akan membuka peluang-peluang kerja sama lainnya dimasa mendatang dengan proyek-proyek yang tidak kalah strategisnya.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mempunyai saran-saran mengenai sektor energi baru terbarukan di Indonesia. Adapun saran tersebut adalah antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut;

- Dalam pembangunan infrastruktur sektor energi baru terbarukan, proses kegiatan perizinan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Namun, dalam implementasinya mengurus perihal perizinan membutuhkan waktu yang cukup lama, hal tersebut disebabkan rumitnya birokrasi di pemerintahan yang perlu diikuti secara prosedural. Memang, semua perizinan pada akhirnya mampu dipenuhi dan ditempuh oleh pihak PT Rajamandala Electric Power dalam membangun proyek PLTA Rajamandala melalui prosedur yang berlaku. Akan tetapi, alangkah baiknya untuk mempertimbangkan dengan

merampingkan dengan efisien prosedur perizinan tersebut, supaya proyek-proyek berbasis energi baru terbarukan lainnya yang memang mempunyai potensi yang besar dan diperlukan untuk cepat dibangun dan digarap oleh pemerintah dapat berjalan lancar dan juga cepat apabila perihal perizinan tersebut dipermudah namun tidak mengurangi akan fungsi dari adanya perizinan tersebut.

- Dengan mengkaji Rencana Umum Energi Nasional yang menetapkan target bauran energi baru terbarukan 23% membuat Pemerintah harus bergerak dengan gesit dalam membangun dan mengembangkan proyek-proyek EBT yang mempunyai potensi, agar tercapainya target yang dimaksud. Namun dalam upaya mewujudkan target bauran EBT tersebut masih terhalang beberapa hal yang salah satunya adalah mengenai pendanaan. Maka diharapkan pemerintah perlu upaya untuk meningkatkan ketertarikan Investor asing supaya tertarik dan terlibat dalam proyek-proyek pembangunan khususnya pada sektor energi baru terbarukan, sehingga dengan adanya foreign direct investment membawa angin segar dengan meringankan beban anggaran Pemerintah.